

AKUMULASI KAPITAL DAN EKSISTENSI NEGARA: ANALISIS PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA NELAYAN (KWN) DI KELURAHAN PATTINGALLOANG KOTA MAKASSAR

Ismah Tita Ruslin¹, Nur Aliyah Zainal²

¹Dosen Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

²Dosen Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

¹Email : ismahtitaruslin78_gmail.com

²Email : nur.aliyah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

This study examines the formation of capital accumulation in a fishing community driven by women (fishermen's wives) and is able to produce socio-economic changes in the community. The research, located in Pattingalloang Sub-District, aims to find out the pattern of capital accumulation and the role of state in the Fishermen Women's Community (KWN) Fatimah Az-Zahrah. The research was analyzed with capital accumulation theory, structuration, social networks and the state and social democracy. The research method was carried out qualitatively with a phenomenological approach, which primary data was obtained through observation and in-depth interviews, while secondary data obtaining from various literature, supporting documentation and archives that strengthen primary data. Data analysis techniques derived from words and spoken words from the observed actors. The results, illustrate the pattern of capital accumulation in terms of actors, place the women as empowerment agencies, initiation of empowerment, named Nuraeni and several women so that the Woman Fishermen Community was born, with government and non-government parties. The role of government in the formation of capital accumulation in KWN can be divided into three important roles, namely; division of power, the provider of legal certainty and social security service providers.

Keywords:

Capital Accumulation, KWN, Structuration, Social Networks, Social Democracy

Latar Belakang

Isu pemberdayaan perempuan dari waktu ke waktu semakin mengemuka, seiring dengan semakin menguatnya slogan-slogan pengarusutamaan gender di negeri ini. Hampir setiap wacana-wacana pembangunan masyarakat berbicara tentang perlunya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender adalah sebuah istilah yang kerap kali diucapkan oleh para aktivis sosial, feminis, politikus dalam menggugat kondisi ketidaksetaraan yang pada tataran praksis hampir selalu diidentikkan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Maka istilah kesetaraan gender sering dikaitkan dengan istilah

diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan dan sebagainya.¹

Pada tahun 2000 Presiden mengeluarkan Inpres No.9/2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan, Lembaga Tinggi Negara, Panglima TNI, Polri, Jaksa Agung, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantapan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Meski telah ada payung hukum negara yang melegitimasi keterbukaan akses bagi peran perempuan khususnya di ruang publik untuk setara dengan laki-laki namun maksimalisasi kehadiran perempuan secara kuantitatif masih terkesan minim dengan kata lain masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan masih melanda sebahagian besar keluarga dimana perempuan-perempuan dengan kondisi tertentu masih disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membantu pekerjaan suami (peran ganda) dalam menyanggah kebutuhan keluarga atau memikirkan berbagai strategi agar tetap bertahan hidup, belum lagi berbagai hambatan yang sifatnya kultural menjadi alasan lainnya untuk bersikap pasif merespon ruang partisipasi di era demokrasi dewasa ini.

Keberadaan perempuan dengan kondisi di atas, salah satunya dapat ditemukan pada masyarakat nelayan, komunitas ini masih diidentikkan dengan kemiskinan², sementara perempuan nelayan menurut Kusnadi³ menduduki posisi strategis dalam penyangga kebutuhan keluarga untuk menutupi penghasilan melaut yang terkadang

¹Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Bandung, Mizan, 1999), h. 32.

²Diantara ciri-ciri kemiskinan digambarkan Suharto (2007) meliputi:1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan), 2)Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi, 3) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga), 4) Kerentanan terhadap guncangan individual maupun massal, 5) Rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan SDA, 6) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, 8) Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik dan mental, 9) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil), lihat dalam Sungkowo Edy Mulyono, *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), h.11.

³Kusnadi, *Perempuan Pesisir* (LKis, Yogyakarta, 2006), h. 2.

tidak pasti karena ketergantungan pada kondisi cuaca. Tidak berlebihan jika kondisi ini menghasilkan ironi, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dengan keunggulan potensi laut yang sangat besar, belum mampu menghadirkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat pesisir dan perempuan sebagai pihak paling merasakan dampak dari jeratan kemiskinan akibat adanya peran ganda yang melekat.

Penelitian ini mengangkat topik pemberdayaan perempuan nelayan yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Az-Zahrah di Kelurahan Pattingalloang Kota Makassar. Berawal dari peran seorang ibu bernama Nuraeni yang saat itu mencari cara bagaimana melepaskan nelayan dari jeratan tengkulak sekaligus memberdayakan perempuan pesisir yang cukup terbelakang secara ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya hasil laut serta memanfaatkan peran ganda perempuan di dalam keluarga. Pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas ini melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Makassar, Pertamina, BKKBN, dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan LBH-APIK. Geliat pemberdayaan yang dilakukan perempuan untuk kaumnya menunjukkan bahwa perempuan mampu mengakumulasi kapital sekaligus menghadirkan negara sebagai bagian dari transformasi sosial ekonomi di masyarakat nelayan dan menariknya aktifitas penciptaan sarana produksi kini terus menerus terjadi (*sustainable*), hal ini tentu sangat membantu komunitas nelayan dalam meningkatkan taraf perekonomiannya, tidak hanya itu yang terpenting bukan saja pada pemenuhan kebutuhan tetapi adanya ketahanan ekonomi demi keberlanjutan hidup masyarakat dan sekaligus meningkatkan citra perempuan dilingkungan yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini tentu menarik untuk dianalisis lebih lanjut apa yang menyebabkan KWN 'Fatimah Az-Zahrah' mampu berkembang secara pesat dan mengubah sosial ekonomi komunitas nelayan di Pattingalloang, mengingat sebagian besar komunitas nelayan di tempat-tempat lain masih terbelenggu dalam kemiskinan, diharapkan penelitian ini menghasilkan temuan-temuan baru terkait metode pemberdayaan sehingga dapat menjadi 'pemanik' bagi komunitas-komunitas nelayan perempuan lainnya khususnya di Sulawesi Selatan yang memiliki cukup banyak kawasan pesisir.

Berdasar uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: a. Bagaimana proses terbentuknya akumulasi kapital Komunitas Wanita Nelayan Fatimah Az-Zahrah di Kelurahan Pattingalloang? b. Bagaimana peran

negara dalam proses terbentuknya akumulasi kapital Komunitas Wanita Nelayan Fatimah Az-Zahrah di Kelurahan Pattingalloang?.

Landasan Teori

Akumulasi Kapital dan Pemberdayaan Masyarakat

Modal (*capital*) dapat diartikan sebagai segala bentuk pendapatan atau kekayaan yang dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi yang bertujuan untuk menambah output.⁴ Sedangkan akumulasi kapital menurut Mohtar Mas' oed berwujud pada kegiatan penciptaan sarana produksi secara terus-menerus (*the constant creation of new means of production*), dengankata lain dalam masyarakat yang melakukan pertumbuhan ekonomi, yang terpenting bukan pemupukan kekayaan berupa barang-barang berharga atau barang konsumsi, tetapi penciptaan sarana produksi baru sehingga barang kapital itu terakumulasi.⁵

Faktor kapital menjadi sangat dominan dalam menentukan posisi nelayan. Semakin besar penguasaan kapital maka semakin besar pula kesempatan untuk mempengaruhi proses politik. Kekuatan ekonomi atau kapital mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan kehidupan politik, hukum, dan sosial. Semakin besar penguasaan kapital maka semakin besar kesempatan menempati kelas atas. Semakin ke atas kelas sosialnya maka semakin besar pula kesempatan untuk memengaruhi proses politik, kebijakan publik, dan seterusnya.⁶

Terciptanya akumulasi kapital dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya mengandung dua makna, yaitu: 1.) Memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat agar lebih berdaya, 2.) Upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan pada seseorang/kelompok atau organisasi. Pemberdayaan mencakup lima dimensi yaitu, kesejahteraan, akses dan kontrol atas sumberdaya, partisipasi dan konsientisasi/kesadaran kritis.⁷

⁴Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Liberty: 1987), h. 43.

⁵Mohtar Mas' oed, "Variabel-Variabel Ekonomi Politik", materi perkuliahan Ekonomi Politik pada Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2004.

⁶Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 340.

⁷Keppi Sukesi, dkk., *Migrasi Perempuan, Remitansi dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan* (Malang: UB Press, 2017), h. 38.

Selanjutnya, sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat dikenal istilah Kaizen. Kaizen adalah sebuah konsep yang diambil dari kata-kata dalam bahasa Jepang ‘*kai*’ dan ‘*zen*’, dimana *kai* memiliki arti “perubahan” dan *zen* berarti “baik”. Istilah populernya adalah *continual improvement* yaitu peningkatan berkesinambungan atau suatu proses penyempurnaan terus menerus yang tiada henti. Filsafat Kaizen berpandangan, bahwa hidup kita hendaknya fokus pada upaya perbaikan terus menerus. Kaizen sendiri merupakan proses yang terus menerus terjadi, setiap tahun, setiap bulan, setiap minggunya, bahkan setiap harinya. Dan prosesnya tidak berujung karena perubahan adalah sesuatu yang permanen.⁸

Dalam banyak kasus, *Kaizen* juga bukan tentang ide-ide perubahan yang besar, melainkan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara berkala, seperti: selalu meningkatkan produktivitas, keamanan, dan efektivitas, sambil mengurangi limbah. Secara praktis filosofi ini berbunyi: “Melakukan dengan lebih baik, membuatnya lebih baik, bahkan meningkatkannya. Karena kalau tidak, maka kita tidak bisa bersaing dengan mereka yang melakukannya.” Di Jepang semangat ini mewujud dalam berbagai bentuk perbaikan di segala bidang, mencakup kehidupan rumah tangga, kehidupan bisnis, maupun kegiatan sosial. Boleh dikatakan, filosofi ini diterapkan ke dalam setiap aspek kehidupan seseorang⁹.

Konsep Kaizen dapat diterapkan sebagai upaya pemberdayaan secara berkelanjutan tidak hanya bagi KWN Fatimah Az-Zahrah melainkan juga bagi komunitas-komunitas lain agar mereka dapat mewujudkan kemandirian. Hal tersebut penting agar komunitas-komunitas seperti KWN Fatimah Az-Zahrah maupun komunitas-komunitas lainnya mampu lepas dari ketergantungan terhadap pihak-pihak tertentu utamanya pihak pemerintah.

Teori Strukturasi

Pendekatan yang digunakan dalam studi ilmu sosial sering menjadikan interpretatif sebagai upaya menjelaskan perilaku manusia dibalik apa yang nampak atau terbaca oleh indera, sementara agensi dan struktur terkadang terlewatkan alias tidak dijadikan dasar dalam kajiannya. Kerangka pemikiran struktur dan agensi dapat dipergunakan sebagai dasar analisis untuk memahami posisi dan peran-peran

⁸Venny Eriska, *Kerja Bukan Untuk Uang* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2017), h. 74.

⁹Suharyo Widagdo, *Aku Ingin Sukses* (Kendal: Penerbit Ernest, 2017), h. 89-90.

perempuan di ranah publik yang berada dalam struktur dunia dominasi laki-laki. Melalui teori strukturasi akan memotret praktik-praktik sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. Anthony Giddens menyebutkan bahwa aktivitas-aktivitas sosial tidak dihadirkan oleh para aktor, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor, melalui aktivitasnya, para agen terus mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitasnya.¹⁰

Ketika terjadi perdebatan apakah struktur yang mempengaruhi bekerjanya individu atau individulah yang mempengaruhi terbentuknya struktur sosial, disinilah Giddens muncul dengan teori strukturasinya. Peran perempuan di Patingalloang dipandang sebagai tindakan agensi dari struktur dominasi laki-laki atas pengumpulan modal, dari struktur negara yang mempunyai kuasa atas program-program pemberdayaan masyarakat. Agensi hadir tidak untuk meruntuhkan struktur tetapi memperlihatkan bahwa struktur dan agensi adalah dualitas dimana masyarakat dalam hal ini perempuan memberikan pengaruhnya terhadap keberadaan struktur tetapi struktur juga membatasi agensi pada hal-hal yang lain. Suatu tindakan politik tidak hadir hanya sebagai respons terhadap suatu keadaan tertentu, suatu tindakan agensi yang mengacu pada maksud-maksud yang dimiliki orang ketika tindakan itu dilakukan, melainkan terutama pada kemampuan agen dalam melakukan sesuatu itu, artinya agensi mengandung makna kuasa, tidak hanya representasi tindakan semata. Agensi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku, dalam arti bahwa individu itu bisa bertindak berbeda dalam setiap fase apapun dalam suatu urutan tindakan tertentu.

Integrasi struktur dan agensi dalam memberi peran perempuan di Patingalloang (KWN) memberi ruang bagi luasnya peran dan artikulasi politiknya, struktur dan agensi mencakup ranah mikro dan makro. Struktur seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang berskala besar, tetapi juga mencakup kebudayaan kolektif para aktor. Suatu riset ilmu sosial politik terlibat dalam menghubungkan suatu tindakan (agensi) dengan struktur, tidak ada pengertian ketika struktur menentukan tindakan atau sebaliknya. Domain dasar studi ilmu sosial menurut teori strukturasi bukan pengalaman aktor

¹⁰Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (USA: University of California Press, 1984), h. 12-14.

individual, bukan keberadaan segala bentuk totalitas sosial, tetapi praktik-praktik sosial yang tersusun lintas ruang dan waktu.¹¹

Kaum perempuan dapat mereproduksi ulang perannya diartikulasi melalui berbagai arena sosial politik, disinilah tindakan sosial individu sadar dilakukan. Antara struktur dan agensi dalam analisis peran politik perempuan adalah suatu keniscayaan, menurut Giddens suatu tindakan sosial meliputi struktur, dan semua struktur meliputi tindakan sosial. Agensi dan struktur terjalin tidak terpisahkan di dalam kegiatan atau praktik-praktik manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, manusia dapat membuat sejarah sosialnya sendiri, seperti halnya perempuan.

Jaringan Sosial

Bila ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan-jaringan sosial yang ada di masyarakat, dapat dibedakan menjadi tiga jenis jaringan sosial, yaitu :

Pertama, Jaringan *interest* (jaringan kepentingan), dimana hubungan-hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kepentingan; Jaringan ini terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau spesifik yang ingin dicapai oleh para pelaku. Seperti memperoleh barang, pelayanan, pekerjaan dan sejenisnya, setelah tujuan-tujuan tersebut tercapai biasanya hubungan-hubungan tersebut tidak berkelanjutan. Namun bila tujuan-tujuan tersebut tidak sekongkret dan spesifik seperti itu atau ada kebutuhan-kebutuhan untuk memperpanjang tujuan (dimana tujuan tampak selalu berulang), struktur yang terbentuk pun relatif lebih stabil.

Kedua, Jaringan *sentiment* (jaringan emosi), yang terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermuatan emosi; jaringan ini terbentuk dimana hubungan sosial menjadi tujuan tindakan sosial, misalnya pertemanan, percintaan, hubungan kerabat dan sejenisnya. Struktur sosial yang dibentuk oleh hubungan-hubungan emosi seperti ini cenderung lebih permanen, karena berbasis pada sejumlah nilai dan norma, dan harus ditegakkan guna memelihara keberlangsungannya.

¹¹George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 88.

Ketiga, Jaringan *power* (jaringan kuasa) dimana hubungan-hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan sosial yang bermuatan *power*. Pada jaringan ini konfigurasi-konfigurasi saling keterhubungan antar pelaku di dalamnya disengaja dan di atur. Tipe jaringan sosial ini muncul jika pencapaian-pencapaian tujuan yang telah ditargetkan membutuhkan tindakan kolektif, dan konfigurasi saling keterhubungan antar pelaku biasanya dibuat permanen. Jaringan sosial seperti ini harus mempunyai pusat *power*, yang secara terus menerus mengevaluasi unit-unit sosialnya dan memolakan kembali strukturnya untuk peningkatan efisiensi.

Teori ini hadir untuk melihat keberlangsungan akumulasi kapital yang berlangsung di KWN Fatimah Az-Zahrah terbentuk dari adanya jaringan sosial yang dikembangkan oleh KWN, ketiga tipe jaringan sosial di atas cukup representatif menggambarkan pola jaringan yang terbangun di KWN mulai dari jaringan berbasis kepentingan di awal masa pembentukan, dalam perkembangannya semakin kuat dengan jaringan berbasis kekerabatan dan semakin berkembang ketika jaringan ini melibatkan aspek kuasa dalam sebagai tindakan kolektif aktor-aktor perempuan KWN dalam mengembangkan keberlanjutan organisasi mereka.

Negara dan Demokrasi Sosial

Bayang-bayang negara hampir membayangi setiap aktifitas manusia, dari pendidikan hingga manajemen ekonomi, dari kesejahteraan sosial hingga sanitasi, dari tatanan dalam negerihingga pertahanan luar negeri, negara membentuk dan mengontrol, walaupun ia tidak membentuk dan mengontrol negara mengawasi, mengizinkan atau melarang. Bahkan hal-hal yang dianggap urusan pribadi sekalipun seperti pernikahan, perceraian, aborsi, ibadah keagamaan sepenuhnya harus tunduk pada otoritas bernama negara. Negara adalah sebuah kesatuan politik yang membentuk wilayah hukum berdaulat di dalam batas-batas wilayah tertentu dan menyelenggarakan otoritas melalui serangkaian lembaga permanen. Lembaga ini adalah lembaga yang dapat dikenali bersifat publik dimana mereka bertanggung jawab dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan dibiayai dengan belanja publik.¹²

Salah satu bentuk negara yang dikembangkan dalam beberapa kajian teori negara adalah negara demokrasi-sosial. Kunci untuk memahami negara demokrasi

¹²Andrew Heywood, *Politik*, Edisi Ke-4 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar; 2014), h. 118.

sosial adalah adanya sebuah pergeseran dari sebuah pandangan yang ‘negatif’ tentang negara yang melihat negara jahat, menuju pandangan yang ‘positif’ tentang negara, dimana negara dilihat sebagai sarana untuk memperbesar kebebasan dan mendukung keadilan. Olehnya negara ini berupaya untuk membantu meluruskan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dari praktek ekonomi pasar yang merugikan pihak-pihak kecil. Dalam prakteknya ini menjadi sebuah usaha untuk menghapus kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Pengadopsian dari konsep kebijakan kesejahteraan ini melahirkan apa yang disebut ‘negara kesejahteraan’ yang tanggung jawabnya telah diperluas hingga mencakup dukungan bagi kesejahteraan sosial diantara semua warganegaranya.

Negara menurut Gupta¹³ bukan entitas yang monolitik dan uniter (tunggal, solid dan seragam), tetapi bentuknya jamak, tidak solid dan beragam. Negara tersusun dari *multiple agent, organization, and level* (pusat, provinsi, kabupaten, kelurahan / desa) dengan agenda yang beragam. Dalam penelitian ini difokuskan pada pemerintah Kelurahan Pattingalloang yang memiliki otoritas penuh dalam penyelenggaraan negara di Kelurahan Pattingalloang Kota Makassar, serta dinas perikanan dan sosial Kota Makassar sebagai wujud representasi negara yang memiliki peran dalam pengembangan institusi lokal seperti KWN Fatimah Az-Zahrah. Kehadiran negara sudah selayaknya ikut berperan dalam aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui mengontrol, mengawasi, memberikan ruang, perijinan, kebijakan yang adil serta untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif di ruang-ruang publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif yaitu mengumpulkan, memaparkan dan menganalisa sebuah fenomena sehingga memperoleh penggambaran yang obyektif dan pemahaman yang cukup tentang kajian tentang terbentuknya akumulasi kapital dan keterlibatan negara dalam aktifitas pemberdayaan perempuan nelayan di Kelurahan Pattingalloang Makassar dengan pelibatan kenyataan-kenyataan yang bersifat partinen (sungguh-sungguh ada). Olehnya itu pendekatan yang digunakan

¹³Akhil Gupta, “Blurred Boundaries: The discourse of corruption, the culture of politics, and imagine state” dalam *American Ethnologist*, 22 (2), 1995, h. 392.

dalam penelitian ini adalah fenomenologi¹⁴ yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann, dengan berusaha memahami arti peristiwa, gejala-gejalanya, serta kaitan-kaitannya terhadap apa yang ada serta berbagai situasi sosial yang melingkupinya.

Penelitian dilakukan di Kelompok Wanita Nelayan 'Fatimah Az-Zahrah' Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena kelompok ini telah berhasil menciptakan transformasi kehidupan sosial dan ekonomi bagi komunitas nelayan di wilayah tersebut khususnya terhadap perempuan nelayan.

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini diharapkan akan menemukan gambaran yang obyektif dan pemahaman yang cukup tentang proses terciptanya akumulasi kapital dalam pemberdayaan perempuan nelayan di Kelurahan Pattingalloang serta keterlibatan negara dalam proses tersebut. Dengan mengacu pada metode penelitian yang telah ditetapkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan meliputi 3 (tiga) cara yakni, Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Diskusi Kelompok Fokus (FGD).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Pembentukan Akumulasi Kapital di KWN Fatimah Az-Zahrah Pattingalloang

Perempuan sebagai individu yang menetap dalam ranah patriarki seringkali dianggap sebagai individu dengan ruang-ruang terbatas dan tidak otonom karena keberadaannya telah ditentukan oleh konstruksi sosial budaya bahkan politik yang ada, sehingga memaksa perempuan bertindak pasif, tersubordinasi dan perannya hanya bersifat domestikasi. Patriarki dipraktekkan tidak hanya dalam praktek bernegara tetapi masuk dalam ranah paling kecil yaitu keluarga. Kebijakan-kebijakan pendiskriminasian perempuan, penempatan perempuan asimetris dengan laki-laki, kerja-kerja yang dilakukan perempuan bagi rumah tangganya bahkan rumah tangga nasional belum berbanding lurus dengan kesejahteraan perempuan dan bahkan terkadang masih kurang mendapat perhatian. Berbagai mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan belum banyak mempertimbangkan aspek gender. Ketidakadilan gender yang paling parah

¹⁴Fenomenologi yang dimaksud adalah suatu proses berpikir yang dimulai dari kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai realitas utama gejala bermasyarakat. Periksa Frans M. Parera, "Kata Pengantar", dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. (Jakarta:LP3ES,1990).

ketika hal tersebut sudah mengakar tertanam menjadi sebuah ideologi yang berujung pada sikap pembiaran sekaligus membenaran. Sehingga manifestasi ketidakadilan terus menerus tersosialisasi yang akhirnya diyakini bahwa peran gender seolah-olah merupakan suatu kodrat, sehingga tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang keliru.

Penelitian ini membongkar bentuk konstruksi yang mendiskriminasi perempuan dengan memotret kehidupan masyarakat pesisir di Kelurahan Pattingalloang Kota Makassar, sekaligus menjadi pengaya bagi penelitian-penelitian sebelumnya tentang kekuatan perempuan pada masyarakat pesisir. Menurut Kusnadi berbagai peluang usaha menjadi alternatif bagi penciptaan sumber pendapatan rumah tangga keluarga nelayan membuka ruang keterlibatan ekonomi perempuan di dalamnya. Hal ini ditunjang oleh sistem pembagian kerja yang jelas di masyarakat nelayan, dimana nelayan (laki-laki) yang bekerja melaut mencari sumber utama pendapatan dan perempuan (isteri nelayan), mengemban tanggung jawab terlibat dalam ekonomi di darat, disamping itu mengelola ruang domestik.

Menurut penuturan Nuraeni, potret perempuan Pattingalloang yang terepresentasikan oleh isteri nelayan adalah individu-individu dengan pola aktifitas terbatas yang hanya 'bekerja' mengelola hasil tangkapan suami untuk dikonsumsi keluarga selain pengasuhan anak. Penyanggah ekonomi rumah tangga seutuhnya diperankan oleh laki-laki para nelayan, hasil tangkapan ikan adalah satu-satunya sumber penghidupan. Dapat dibayangkan jika sehari saja para nelayan tidak melaut maka dapat dipastikan dapur mereka tidak akan berasap. Sementara perempuan tidak memiliki keterampilan lain kecuali mengolah makanan untuk dikonsumsi, itupun dengan hanya beberapa jenis varian masakan saja, misalnya ikan dimasak dengan campuran kunyit dan asam, digoreng atau dibakar yang saat itu juga habis dikonsumsi. Jangankan berbicara investasi, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja mereka sangat terbatas.¹⁵

Digambarkan Nuraeni, bahwa sebuah keniscayaan jika masyarakat nelayan diidentikkan dengan kemiskinan, minimal beliau melihatnya di lingkungan ini. Pendidikan yang rendah melahirkan pola pikir mereka yang tidak berkembang. Belum lagi ketergantungan suami pada tengkulak yang cukup tinggi. Para tengkulak memanfaatkan kondisi nelayan untuk meraup keuntungan, misalnya tengkulak

¹⁵ Nuraeni, Ketua Komunitas Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Azzahrah, *wawancara*, Pattingalloang, 10 Juli 2018, Pukul 11.20 WITA.

memanfaatkan momen-momen tertentu, di saat nelayan membutuhkan uang, yakni saat cuaca buruk maupun masa-masa pendaftaran sekolah. Ketergantungan pada tengkulak ini berdampak pada isteri yang mengatur ekonomi rumah tangga. Sehingga ‘cekok’ rumah tangga dan kekerasan fisik menjadi hal lainnya yang mewarnai kehidupan rumah tangga nelayan. Inilah yang menggerakkan saya bagaimana agar mereka atau generasi mereka berpendidikan, minimal mereka punya daya tawar atau kepercayaan diri.¹⁶

Perempuan dan kemiskinan dalam masyarakat nelayan dan komunitas yang ‘lemah’ secara ekonomi menjadi bagian yang terintegrasi, karena sejatinya aktor yang memikul beban ganda (dalam wacana gender) itu ada pada perempuan. Hal ini jugalah yang menggerakkan hati Nuraeni, melihat kaumnya yang tidak hanya bergulat dengan kekerasan kemiskinan tapi juga dengan kekerasan fisik yang justru terjadi di dalam lingkungan domestik mereka. Hingga suatu hari di tahun 2004, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang kala itu juga salah satu dari sedikit sarjana di Patingalloang merasa resah dengan kondisi sekitar tempat tinggalnya yang dari tahun ke tahun dianggap sebagai hal yang normal dan seakan tidak dipermasalahkan bahkan seolah menjadi ‘pranata sosial’ di komunitas tersebut. Apa yang dipikirkan oleh Nuraeni tentang lingkungannya, kaumnya adalah titik awal dari penciptaan modal. Nuraeni saat itu tentu saja tidak lantas membayangkan bahwa dengan niat ini akan membuatnya kelak dikenal banyak orang, mendapat penghargaan dan lain sebagainya, yang terpikir hanyalah bagaimana orang-orang di lingkungannya tersadarkan bahwa kondisi ini bukan hal yang normal karena alam (pesisir) mendukung untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik.¹⁷

Jumlah anggota KWN mulai mengalami peningkatan partisipasi yang awalnya cuma 3 orang, meningkat menjadi 15 orang sewaktu pengajuan proposal kedua di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Makassar sudah terbentuk nama Fatimah Az-Zahrah meski pembentukan resminya baru di tahun 2007. Demikian halnya dengan laba yang diperoleh dari awalnya cuma 1.500.000, akhirnya berkembang di tahun berikutnya menghasilkan 35 kg abon perbulan dengan kisaran harga 100.000/ kg, selang beberapa bulan berikutnya pengolahan abon mulai meningkat dengan menghasilkan 50 kg, dan

¹⁶Nuraeni, Ketua Komunitas Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Azzahrah, *wawancara*, Patingalloang, 10 Juli 2018, Pukul 11.20 WITA.

¹⁷Nuraeni, Ketua Komunitas Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Azzahrah, *wawancara*, Patingalloang, 10 Juli 2018, Pukul 11.20 WITA.

seterusnya semakin meningkat seiring dengan adanya bantuan dari pihak pemerintah dan kucuran kredit melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari perbankan, dan kerjasama dengan pihak Pertamina dalam bentuk CSR Pertamina dan bantuan modal dari pihak lainnya pengolahan abon pernah mencapai 2 ton / bulan di tahun 2014.

Pola pembentukan akumulasi kapital terjadi melalui dua hal: **Pertama**, perempuan sebagai agensi pemberdayaan, persoalan-persoalan perempuan dirasakan sangat berdampak pada aspek yang lebih luas tidak semata masalah ekonomi tetapi juga pada ranah sosial sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Menyadari potensi modal yang ada dikelilinginya Nuraeni membentuk KWN Fatimah Az-Zahrah, aset besar itu adalah para perempuan (isteri nelayan) dan potensi laut yang menjadi basis ekonomi rumah tangga nelayan, setelah dikelola dengan manajemen pemberdayaan maka terbukti menghasilkan modal yang lebih besar lagi. **Kedua**, terbentuknya jaringan sosial, setelah KWN berdiri komunitas ini mengembangkan jaringan melalui kemitraan dengan beberapa pihak yang dipandang perlu hadir dalam persoalan perempuan di Pattingalloang yang tidak lagi semata hanya urusan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial, seperti kekerasan perempuan, kekerasan anak dan pemenuhan hal lansia, terbentuklah UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang bernaung di bawah KWN Fatimah Az-Zahrah, mitra KWN selain dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial, BKKBN, juga bermitra dengan LBH APIK, IWAPI dan Pertamina.

Sejak tahun 2014 Pertamina membidik KWN Fatimah Az-Zahrah sebagai salah satu komunitas sasaran CSR, alasan utama menjadikan KWN sebagai komunitas binaan karena setelah melakukan beberapa survei pemetaan komunitas, KWN dianggap berhasil membawa perubahan di masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi di komunitas nelayan. Selain itu keberadaan KWN di Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah juga dekat dengan area operasi kerja Pertamina regional VII (terminal BBM).

Peran Negara dalam Pembentukan Akumulasi Kapital

Peran negara dalam pembentukan akumulasi kapital di KWN Fatimah Az-Zahrah, ada tiga: *Pertama*, Pembagian kekuasaan, pergeseran peran-peran negara menyaratkan bagi negara mendukung terbentuknya institusi-institusi lokal dan memberikan ruang partisipasi bagi keterlibatan masyarakat dalam urusan-urusan publik.

Seiring dengan era otonomi daerah dan tanggungjawab bersama untuk membangun kapasitas masyarakat sipil (*civil society*), peran pemerintah tidak lagi semata pada tataran regulator atau implementasi dari aturan yang ada, tetapi sudah bergeser ke fasilitator, mediator, dan dinamisator. Peran-peran yang substantif dalam kaitannya dengan pembangunan dan penguatan kapasitas sosial menjadi tanggungjawab utama masyarakat. Dengan demikian nampak bekerjanya dualitas struktur dalam hal ini pemerintah dan agensi pada tataran masyarakat yang bergerak untuk pemenuhan kesejahteraan mereka bertemu dengan satu kepentingan bersama yaitu peningkatan kesejahteraan bersama. Tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang telah terbangun di KWN menjadi pemantik bagi pemerintah dalam menjalankan peran-peran sentralnya dengan kata lain peran demikian bisa dimainkan secara optimal jika kelembagaan sosial ekonomi masyarakat sipil sudah berjalan dan berfungsi dengan baik. Kedepannya pemerintah khususnya di Patingalloang dituntut untuk semakin memfasilitasi munculnya institusi-institusi lokal lainnya yang nantinya akan bersinergi dengan institusi yang sudah mapan, sekaligus masyarakat dapat berdaya secara bersama-sama.

Kedua, pemerintah hadir dengan jaminan kepastian hukum. Hal ini tidak sebatas pemberian legalitas dari pemerintah terhadap program-program berkegiatan masyarakat, tetapi pemerintah hadir dalam memastikan terciptanya keadilan di masyarakat serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat.

Ketiga, pemerintah hadir sebagai penyedia layanan ketahanan sosial. Keberlangsungan KWN tidak hanya dirasakan oleh masyarakat tetapi juga dirasakan manfaatnya langsung bagi pemerintah, karena program KWN membantu terselenggaranya program-program pemerintah khususnya tanggung jawab negara dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu melalui pola kemitraan Kelurahan dengan Dinas Perikanan dan kelautan, atau Kemitraan Kelurahan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, secara khusus untuk keberlangsungan KWN dalam mengembangkan dirinya dan anggota-anggotanya, dan secara luas yang tidak kalah pentingnya adalah untuk masyarakat Patingalloang. Pola-pola pemberdayaan di KWN Fatimah Az-Zahrah dan kehadiran sinergitas antara *stakeholder* tentunya bisa dan layak ditiru oleh komunitas-komunitas lainnya, khususnya komunitas masyarakat pesisir di Kota Makassar.

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa disinilah letak perbedaan kelompok-kelompok yang digerakkan dari masyarakat dan kelompok-kelompok yang terbentuk sesaat, yakni kelompok-kelompok temporal yang kemunculannya berbasis program pemerintah. Umumnya kelompok yang diinisiasi oleh masyarakat itu lebih lama bertahan dibandingkan dengan kelompok yang berbasis program pemerintah, meski kita juga tidak dapat menutup mata bahwa ada juga kelompok-kelompok yang lahir dari program pemerintah kemudian karena terus menerus diberdayakan akhirnya bisa mandiri dan berkembang menjadi mitra pemerintah.

Penutup

Dalam banyak kasus perempuan kerap kali mengalami penderitaan di ranah domestik (rumah tangga), hal ini tidak lepas dari konstruksi yang terbangun memosisikan perempuan hanya sebagai instrumen untuk pemenuhan kebutuhan orang lain, perempuan hadir bukan sebagai tujuan bagi dirinya sendiri. Dinamika masyarakat di Kelurahan Pattingalloang juga mengalami hal-hal yang demikian, khususnya di komunitas nelayan, peran-peran perempuan awalnya dikonstruksikan hanya sebagai aktor domestik yang tidak punya kuasa di ranah publik. Tetapi melalui kehadiran KWN Fatimah Az-Zahrah bangunan konstruksi atas pemaknaan perempuan menjadi tidak lagi relevan sepenuhnya mengingat terjadinya pembentukan akumulasi kapital yang digerakkan oleh para perempuan yang berdampak pada terjadinya perubahan sosial, ekonomi dan yang tak kalah pentingnya adalah perubahan *mindset* masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan.

Pola kemitraan antara KWN dan beberapa mitranya seperti Pertamina, Dinas Kelautan dan Perikanan, BKKBN, LBH APIK dan IWAPI memberikan efek yang luas terhadap usaha pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir khususnya di Kelurahan Pattingalloang. Keterlibatan perempuan nelayan dalam hal ini turut membantu dalam perekonomian keluarganya. Kehadiran pemerintah untuk menjamin terselenggaranya upaya tersebut dalam hal ini memastikan terciptanya keadilan di masyarakat serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyono, Sungkowo Edy. *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Eriska, Venny. *Kerja Bukan Untuk Uang*. Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2017.
- Heywood, Andrew. *Politik*, Edisi Ke-4. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. USA: University of California Press, 1984.
- Gupta, Akhil. "Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, The Culture of Politics, and Imagine State" dalam *American Ethnologist*, 22 (2, 1995).
- Irawan dan M. Suparmoko. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty: 1987.
- Kusnadi. *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Nuraeni, Ketua Komunitas Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Azzahrah, *wawancara*, Pattingalloang, 10 Juli 2018, Pukul 11.20 WITA
- Mas'oed, Mohtar. "Variabel-Variabel Ekonomi Politik" dalam *Materi Perkuliahan Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2004).
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda?, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Parera, Frans M. "Kata Pengantar" dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Satria, Arif. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Sukesi, Keppi dkk. *Migrasi Perempuan, Remitansi dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan*. Malang: UB Press, 2017.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Widagdo, Suharyo. *Aku Ingin Sukses*. Kendal: Penerbit Ernest, 2017.